

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pangkalan Militer AS berdiri di Kepulauan Okinawa sejak tahun 1951. Selama berdiri pangkalan tersebut, kita sama sekali tidak mendengar keluhan yang ditimbulkan oleh pembukaan pangkalan militer tersebut. Pada dasarnya banyak masyarakat Jepang, khususnya yang tinggal di Okinawa merasa keberatan dengan adanya pangkalan militer AS yang berdiri di daerah yang bukan kawasannya. Tetapi mereka meyakini bahwa pangkalan tersebut berdiri karena sebagai syarat kekalahan Jepang oleh sekutu.

Hal yang membuat penulis ingin menulis issue secara lebih lanjut adalah karena masyarakat Okinawa baru bergerak beraksi menentang berdirinya pangkalan tersebut setelah lama pangkalan itu berdiri. Mereka mulai menentang pada tahun 1995 sejak terjadinya kasus pemerkosaan oleh anggota militer AS dan jatuhnya pesawat di universitas Jepang pada tahun 2004. Penolakan besar-besaran yaitu ketika mereka menyadari bahwa banyak kerugian yang telah mereka dapatkan dari pembukaan pangkalan tersebut.

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Okinawa beserta pemerintahan baru Jepang PM Hatoyama ternyata tidak menciutkan nyali AS sehingga mereka akan

menutup pangkalan itu. AS justru tetap bersikukuh untuk tetap mempertahankan pangkalan tersebut tetap berdiri di Okinawa. Penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai Nilai Strategis Pangkalan Militer AS di Jepang dalam melindungi kepentingannya di Asia Pasifik. Dalam penulisan tersebut menggambarkan Nilai Strategis Pangkalan Militer AS di Okinawa.

Dalam penulisan kali ini, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai Kepentingan AS dalam mendirikan pangkalan militer di Okinawa. Penulisan ini akan menitik beratkan pada kepentingan AS mendirikan pangkalan militernya di Okinawa yang akan menjadi bukti terhadap alasan AS dalam mendirikan Pangkalan Militernya di negara lain. Oleh karena itu penulis mengambil judul *"Kepentingan Amerika Serikat Dalam Mempertahankan Keberadaan Pangkalan Militernya di Okinawa, Jepang"*.

B. Tujuan Penulisan

Dalam sub-bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan ini disusun, yaitu antara lain:

1. Untuk menelaah lebih dalam mengenai kepentingan AS dalam mendirikan Pangkalan Militer di Okinawa, Jepang sementara rakyat Okinawa menentang adanya Pangkalan tersebut.

2. Agar menjadi bacaan dan referensi bagi mahasiswa atau golongan akademisi lainnya yang berminat meneliti issue-issue selanjutnya atau bagi pembaca yang hanya ingin mengetahui issue yang berkaitan dengan judul penelitian.
3. Penulis ingin menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran di tingkat Universitas jurusan Ilmu Hubungan Internasional ke dalam issue-issue yang penulis teliti.
4. Penulisan ini disusun juga sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana I dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

C. Latar Belakang Masalah :

Di Kepulauan Okinawa terdapat pangkalan militer Amerika Serikat. Pangkalan itu berdiri sejak berakhirnya Perang Dunia II yang tepatnya berdiri pada 8 September 1951. Pakta pertahanan Jepang yang asli di tandatangani pada tahun 1951, dan Mutual Security Treaty yang diperbaharui di tandatangani pada tahun 1960 di Washington. Berdasarkan perjanjian tersebut AS memiliki hak untuk mempertahankan kekuatan darat, laut dan udaranya di Jepang. Kekuatan ini dapat dipergunakan untuk : (1) mempertahankan perdamaian dan perdamaian di Timur jauh tanpa konsultasi terlebih dahulu; (2) Setelah berkonsultasi, AS dapat melakukan tindakan untuk mempertahankan Jepang dari serangan bersenjata pihak luar. Perjanjian tersebut merinci bahwa operasi yang dijalankan dari basis Jepang oleh

pihak lain “harus melakukan konsultasi terlebih dulu dengan Pemerintah Jepang”.¹ Sebuah perjanjian 2 negara yaitu seperti yang dilakukan AS-Jepang yang mengikrarkan dukungan militer, jika mereka diserang oleh negara lain, maka pakta keamanan bilateral yang telah mereka tandatangani dapat dijadikan alasan ataupun bukti tertulis sehingga mereka dapat memberikan bantuan yang segera dan tanpa batas jika terjadi serangan terhadap salah satu negara tersebut, atau mereka dapat melakukan konsultasi sebelum melakukan tindak balasan.²

Menurut masyarakat setempat pangkalan ini berdiri sebagai salah satu syarat yang diajukan sekutu atas kekalahan Jepang dalam perang itu. Keberadaan Pangkalan ini telah lama menjadi sorotan umumnya kaum muda Jepang yang tidak hanya berasal dari masyarakat Okinawa saja, dimana ada sebuah pangkalan militer yang berdiri di luar teritorinya. Keberadaan pangkalan ini dinilai melanggar hukum internasional. Setelah perang dunia II berakhir, tentara AS mengusir warga yang selamat dari perang ke kamp-kamp konsentrasi dan mengambil tanah mereka tanpa ganti rugi. Ini melanggar konvensi Hague yang melarang pelanggaran hak milik bahkan selama perang, dan ini mengharuskan mereka membayar meskipun untuk keperluan perang. Pada tahun 1953, tentara AS menggusur rumah-rumah serta membakarnya, sehingga pangkalan militer AS meluas seperti yang ada sekarang.³

¹Drs. Wawan Juanda, *Kamus Hubungan Internasional*, Putra A. Bardin. CV, 1999, hal 152

²*Ibid*, hal 140

³<http://www.mail-archive.com/itb@itb.ac.id/msg15753.html> di akses tanggal 18 Desember 2009

Dengan keberadaan pangkalan Militer tersebut, masyarakat Jepang memandang bahwa itu sebuah penghinaan, kewibawaan Kaisar mereka telah digerogoti atau dengan kata lain Kedaulatan Jepang dengan berdirinya pangkalan itu patut untuk dipertanyakan. Akan tetapi, penduduk Okinawa baru bereaksi ketika seorang siswi diperkosa oleh tiga anggota Militer AS pada 1995. Sejak saat itu, desakan penutupan pangkalan militer itu mulai meningkat, ditambah dengan adanya insiden sebuah helikopter yang jatuh disebuah Universitas Jepang pada 2004, belum lagi masalah lingkungan lainnya seperti polusi udara dan suara karena kegaduhan yang ditimbulkan oleh pesawat Militer AS. Aksi memanas beberapa hari sebelum kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Jepang.⁴

Sebagian besar rakyat Jepang menolak kehadiran pangkalan Militer AS di Pulau Okinawa. Tuntutan tersebut memang sudah seharusnya diperhatikan mengingat hanya pada tahun 2007 saja, tercatat 46 kasus tindak kejahatan para marinir AS di Jepang.⁵ Dengan Pemerintahan baru Jepang PM Yukio Hatoyama yang terpilih September 2009 lalu yang mengakhiri kekuasaan konservatif itu, sehingga isu penutupan pangkalan AS menjadi Agenda Nasional.⁶ Wali Kota Ginowan Yoichi Iha dalam aksi demonya memaparkan bahwa beliau mendesak Perdana Menteri Yukio Hatoyama agar mengatakan kepada Presiden Obama bahwa Okinawa sudah tidak

⁴ <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/282700/> diakses 9 November 2009

⁵ http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1166&Itemid=47 diakses 12 Januari 2010

⁶ <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/282700/> diakses 9 November 2009

memerlukan Pangkalan Militer AS lagi.⁷ Masyarakat Okinawa ingin mengakhiri penderitaan yang mereka alami selama ini, terlebih mereka telah menyerahkan sebagian besar tanahnya untuk pendirian pangkalan tersebut.

Sejarah mencatat bahwa Okinawa, sebuah pulau 1600 km selatan Tokyo ini, masih belum “merdeka”. Okinawa jatuh ke tangan AS sejak berakhirnya perang dunia II pada 19 Agustus 1945. Pada 1973, AS mengembalikan Okinawa kepada Jepang. Pengembaliannya pun bukan tanpa syarat. Ia dibuat berdasarkan pakta yang merugikan Jepang. Bunroku Yoshino, bekas direktur Biro Amerika Kementerian Luar Negeri, membeberkan isi pakta rahasia pengembalian Okinawa di depan pengadilan distrik Tokyo, bulan November lalu. Pakta tersebut mengizinkan AS membawa senjata nuklirnya ke Jepang, dan Jepang harus membayar US\$340 juta untuk pengembalian Okinawa, pemindahan *Voice of America* dan relokasi pangkalan militer.⁸

Sebuah perjanjian ditandatangani AS dan Jepang pada 2 Desember 1996. Perjanjian ini mewajibkan AS mengembalikan 21% dari total wilayah militernya di Okinawa kepada Jepang. Setelah hampir satu dekade, pengembalian wilayah ini belum terealisasi. Pertemuan Jepang – AS berlanjut lagi tahun 2006 untuk membahas proses relokasi Stasiun Udara Futenma ke Nago, tetapi hasilnya nihil. Tiga tahun kemudian, tepatnya 17 Februari 2009, AS (Hillary Clinton) dan Jepang (Nakasone Hirofumi)

⁷ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=239468> diakses 9 November 2009

⁸ Artikel yang ditulis oleh Arif Yudhanto di *Aerospace* diakses 7 Januari 2010 di <http://planet.aerospaceitb.org/>

menandatangani Traktat Guam (*Guam Treaty*) yang diantaranya berisi: (1) Pemindahan 8000 personel marinir AS beserta 9000 anggota keluarganya ke Guam, di perairan pasifik. (2) Pemindahan stasiun udara Futenma di Ginowan ke Nago, tepatnya di Camp Schwab. Proses pemindahan ini akan dilakukan hingga 2014.⁹

Butir pertama didukung oleh Perdana Menteri Yukio Hatoyama yang September 2009 lalu baru terpilih. Koalisi politik antara partainya, *Democratic Party of Japan (DPJ)*, dan dua partai lain, *Social Democratic Party (SDP)* and *People's New Party (PNP)*, juga mendukung butir pertama ini. Butir kedua masih merupakan repetisi dari perjanjian tahun 2006, dan ditentang oleh masyarakat dan parlemen karena Nago masih merupakan bagian Okinawa. Empat belas tokoh penting Okinawa mengeluarkan petisi memprotes Hillary Clinton dan Barack Obama. Mereka menuntut pemindahan total ke Guam, atau bahkan ke luar Jepang.¹⁰

Menurut McCormack, Profesor Amerika Australia National University, melihat traktat Guam 2009 sebagai Perjanjian yang tak setara, inkonstitusional dan berdampak lingkungan bagi Okinawa. Traktat ini tidak setara karena hanya Jepanglah yang wajib menanggung biaya total pemindahan sekitar US \$ 6.1 miliar. Inkonstitusional karena menurut Article 95 dari konstitusi Jepang, keputusan ini dibuat tanpa persetujuan mayoritas masyarakat Nago. Berdampak lingkungan karena proyek ini akan merusak hutan dan laut di teluk Uora. Profesor McCorm

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

menyebut perjanjian Guam ini dalam bahasa Jepang “gomakashi”, atau mengandung unsur muslihat dan kebohongan.¹¹

Aliansi keamanan AS-Jepang menjadi tegang oleh sikap para pemimpin kiri-tengah baru Yukio yang tetap berjanji akan mengurangi sikap tunduk dan patuh mereka terhadap rencana bagi pengadaan sebuah pangkalan militer baru AS. Pemerintah Jepang yang baru, yaitu pemerintahan Yukio Hatoyama mengisyaratkan kemungkinan membatalkan persetujuan untuk membangun pangkalan angkatan udara baru di pulau Okinawa di selatan negara itu, di mana banyak penduduk setempat sejak lama menyatakan keberatan mereka terhadap keberadaan militer Amerika dalam jumlah besar di sana.¹²

“Sikap atau pernyataan ‘tidak’ Hatoyama adalah sikap menentang pertamakalinya bagi Jepang terhadap AS selama puluhan tahun,” kata analis politik Minoru Morita, yang memperingatkan bahwa “hubungan Jepang-AS kini berada dalam bahaya.” Beberapa pengamat memperingatkan bahwa pemerintah baru Jepang memberi peluang bagi politik dalam negeri untuk mengancam aliansi keamanan tersebut yang melindungi Jepang di dalam melalui Perang Dingin dan yang sejak itu terus berlangsung.¹³

¹¹ *Ibid*

¹² http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33737:penolakan-pangkalan-militer-baru-goncang-aliansi-as-jepang&catid=465:04-november-2009&Itemid=222
diakses 11 Januari 2010

¹³ *Ibid*

Perdana Menteri baru Jepang Yukio Hatoyama mengatakan dalam kampanyenya lalu bahwa dia akan meninjau kembali perjanjian Jepang – AS dan menginginkan pangkalan itu dipindahkan dari Pulau Okinawa atau bahkan dari Jepang. Namun, pernyataan tersebut mendapat tekanan dari AS, yang meminta Jepang untuk menghormati perjanjian. Sebagaimana dilansir Press TV, Robert Gates, Menteri Pertahanan Amerika, pada hari Selasa 20 Oktober 2009 lalu di hadapan para wartawan di Jepang menolak permintaan Tokyo terkait peninjauan kembali NOTA kesepakatan militer tahun 2006 dan mengatakan, “Terkait masalah yang punya hubungan dengan kami, harus kami katakan bahwa tidak ada perjanjian pengganti nota kesepakatan sebelumnya.”¹⁴ Meskipun demikian Wali Kota Ginowan Yoichi Iha menegaskan bahwa pemerintah Jepang tetap menjadi sekutu penting bagi AS.¹⁵

Perdana Menteri Yukio Hatoyama berjanji akan mengambil keputusan tentang relokasi pangkalan udara Futema Korps Marinir Amerika Serikat di Prefektur Okinawa pada Mei 2010 mendatang ke tempat baru. AS mendesak Jepang untuk segera melaksanakan satu rencana bilateral merelokasi pangkalan marinir itu ke bagian yang penduduknya jarang di prefektur itu seperti yang telah disepakati pada tahun 2006 lalu.¹⁶ Pemerintah Amerika Serikat menghimbau pemerintah Tokyo agar

¹⁴http://Indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=16027&Itemid=26 diakses 9 November 2009

¹⁵ <http://www.seputar-Indonesia.com/ediscetak/content/view/282700/> diakses 9 November 2009

¹⁶ http://www.tvone.co.id/berita/view/30638/2009/12/26/jepang_putuskan_relokasi_pangkalan_militer_as_mei_2010 diakses pada 11 Januari 2010.

membantu mengakhiri sengketa pangkalan AS dan menjelaskan sikapnya tentang persekutuan AS-Jepang, yang telah menopang keamanan di Asia selama 50 tahun.

AS tak tinggal diam mengetahui permasalahan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton melobi Pangkalan Okinawa dengan bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Jepang Katsuya Okada di Washington. Perundingan itu dilakukan menjelang kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Jepang.¹⁷ Hillary Clinton juga menyampaikan pesan kepada Katsuya Okada ketika Hillary mulai kunjungan ke empat di Asia sejak dia menjadi Menlu. Banyak aspek yang diperlukan untuk memeliharanya, sehingga sayang apabila harus ditutup atau bahkan keluar dari Jepang.¹⁸ Robert Gates selaku Menteri Pertahanan AS juga mempertegas bahwa tak ada pengganti nota kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya mengenai pangkalan militer tersebut.

D. Pokok Permasalahan :

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas beserta data-data yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : *“Mengapa AS bersikukuh mempertahankan keberadaan Pangkalan Militernya di Okinawa?”*

¹⁷<http://www.wartakota.co.id/read/warta/15570> diakses 12 Januari 2010

¹⁸ <http://www.sinarharapan.co.id/brita/read/as-imbau-jepang-bantu-akhiri-sengketa-pangkalan/> diakses 11 Januari 2010

E. Kerangka Dasar Pemikiran:

Dalam membantu penulis untuk menentukan arah penelitian serta mempermudah untuk menentukan hipotesa, penulis memerlukan kerangka dasar pemikiran, sebagai berikut :

1. Kepentingan Nasional

Menurut Morgenthau, Kepentingan Nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.¹⁹ Definisi Kepentingan Nasional yang lain adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.²⁰ Dengan kata lain, kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu Negara.²¹

Negara-negara yang penting dalam politik dunia adalah Negara yang berkekuatan besar (Great Power). Oleh kaum realis, hubungan internasional

¹⁹Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 163

²⁰Jack C Plano & Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, terjemahan Wawan Juanda; third edition, Clio Press Ltd, England, 1982

²¹Robert Jaccson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relation*, terjemahan Dadan Surya Dipura; New York. Oxford University Press Inc, 1999, hal 89

dipahami sebagai perjuangan untuk mendominasi dan keamanan diantara Negara-negara berkekuatan besar.²² Oleh karena itu, Negara saling berpacu dalam membuktikan bahwa dialah yang berkuasa dan mempunyai kekuatan tak tertandingi oleh Negara lainnya, yang ini menyebabkan terciptanya sikap tunduk atas Negara yang tampil sebagai Negara yang lebih kuat atau tampil sebagai pemimpin.

Setelah Jepang kalah pada PD II, maka semua senjata yang dimiliki oleh militer Jepang dilucuti. Dan Jepang harus menandatangani perjanjian yang di dalamnya terselip makna tidak diperbolehkannya memiliki militer. Oleh karena itu, Prajurit Jepang dinamakan Pasukan Bela Diri.²³ Dengan adanya hal itu, tidak mungkin tidak nasib keamanan Jepang berada di tangan AS, sejak 50 tahun silam. AS yang mengendalikan roda kermanan Jepang yang seharusnya dapat dilakukan sendiri oleh negara-negara yang berkedaulatan.

Dimata AS, Jepang adalah Negara yang sangat mampu menyokong kebutuhan militer AS untuk memperkuat sector militernya yang lebih modern yang ada di Okinawa. Dengan terciptanya kekuatan besar dari pangkalan tersebut dan berambisi tampil sebagai negara nomor satu atas Negara-negara yang menjadi pesaingnya, maka AS bisa dengan mudah menyentuh ataupun mendapatkan apa saja yang dikehendaknya. Perkembangan kekuatan China

²² *ibid*

²³ <http://unesaprodijepang.wordpress.com/2009/09/10/jepang-kini-pangkalan-militer-amerika/> diakses 12 Januari 2010

dan Korea Utara saat ini jelas membuat AS merasa terancam keamanannya, terlebih mengenai program nuklir Korea Utara saat ini dan dikhawatirkan Korea Utara bekerja sama dengan China. Ini akan berpengaruh terhadap existensi AS di mata dunia apabila kekuatan yang lebih besar dimiliki oleh negara yang menjadi pesaingnya.

Keamanan yang tidak stabil ini akan berdampak pula bagi kesejahteraan ekonomi AS, dimana AS berambisi dalam menciptakan pasar bebas baginya diantara negara-negara kawasan tersebut, terutama dengan para sekutunya. Oleh sebab itulah AS bersikukuh mempertahankan pangkalan militernya di Okinawa demi menjaga apa yang sudah AS miliki, terutama untuk menjaga stabilitas keamanan yang itu merupakan hal yang vital bagi sebuah negara. Hal ini juga diperuntukkan dalam melancarkan kepentingan AS di kawasan tersebut yang telah ada dibenak AS.

2. Security Dilemma

Security Dilemma dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara. Tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya akan berakibat atau dianggap melemahkan keamanan negara lainnya.²⁴ Sebaliknya reaksi dari negara terakhir terhadap tindakan negara pertama tersebut akan direspon dengan cara yang sama oleh

²⁴ Robert Jervis, "Cooperation Under The Security Dilemma" dalam Richard K. Betts, *Conflict After the Cold War Arguments on Causes of War and Peace*, Mac Millan Publishan Company, New York, 1994, hal 315

negara yang pertama.²⁵ Keadaan ini mengakibatkan mereka merasa dalam keadaan yang tak aman dan terancam sehingga mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk kemungkinan terburuk, yaitu perang.²⁶

Bentuk konkrit dari security dilemma adalah perlombaan senjata (arms race). Menurut Barry Buzan, perlombaan senjata adalah “.....*Self-stimulating military rivalry between states. In which their efforts to defend themselves militarily cause them to enhance the threats they pose to each other*”.²⁷ Inti dari perlombaan senjata dari pengertian tersebut adalah adanya dinamika kompetisi dalam sector persenjataan militer diantara dua negara atau lebih untuk mempertahankan diri. Sedangkan menurut Samuel Huntington lebih menekankan pada adanya akumulasi kompetisi yang terjadi di antara dua aktor atau lebih dengan kemungkinan bahwa proses tersebut adalah untuk melawan satu sama lain.²⁸

Ketika suatu negara berusaha meningkatkan kemampuan pertahanannya melalui peningkatan kekuatan persenjataannya, maka akan terjadi suatu keadaan dimana tak jarang tindakan tersebut dipandang oleh negara lain adalah untuk meningkatkan kekuatan persenjataannya melebihi dari yang diperlukan untuk pertahanan saja (defensive), tetapi sudah

²⁵ Amien Rais, *Politik Internasional Dewasa Ini*, Usana, Surabaya, hal 69-70

²⁶ Martin Griffiths and Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concept*, Routledge Taylor and Francis Group, New York, 2002

²⁷ Barry Buzan, “An Introduction to Strategic Studies Military Technology and International Relation” dalam Ikrar Nusa Bakti, “*Forum Regional di Asia Pasifik*”, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, 1997, hal. 62

²⁸ Colin Gray, “The Arms Race Phenomenon”, dalam Biveer Singh, “*The Challenge of Conventional Arms Proliferation In Southeast Asia*”, CSIS, Jakarta, 1995, hal. 69

dipandang sebagai kekuatan penyerangan (offensive). Sehingga apa yang dilakukan oleh negara tersebut akan direspon oleh negara lain dengan cara melakukan hal yang sama, dan pada akhirnya keadaan tersebut justru membuat keamanan negara pertama itu menurun.²⁹ Dan ketika negara pertama merasa keamanannya terganggu, maka negara pertama tersebut akan meningkatkan kekuatan militernya untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang ditimbulkan oleh negara kedua (negara lain). Proses tersebut akan berlangsung terus dan tak berujung.

Menurut pendekatan realisme, ide dan asumsi dasar dari kaum realis adalah (1) sifat manusia yang selalu pesimis; (2) berkeyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang; (3) menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup Negara; (4) skeptisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestic. Dalam pemiliran kaum realis, manusia selalu diasumsikan dengan perasaan cemas akan keselamatan dirinya sendiri dalam hubungan persaingannya dengan yang lain. Mereka selalu ingin jadi nomor satu, menjadi pengendali atas yang lain, tidak mau diambil keuntungannya dan berusaha menjadi yang terkuat dalam hubungannya dengan yang lain, begitu juga dalam hubungan antar Negara. Dalam hal ini,

²⁹ Richard Little and Michael Smith, "Perspectif on World Politics" dalam Dafri Agus Salim, *"Perimbangan Kekuatan Militer di Kawasan Asia Pasifik Pasca Perang Dingin"*, Lembaga Penelitian UGM, Depdikbud, 1999, hal. 6-7

manusia dipandang pada dasarnya adalah sama, berkeinginan memperoleh kekuasaan dan mencegah dominasi dari yang lain.³⁰

Berbicara mengenai Negara yang tak lepas dari pemikiran dan teori di atas, AS adalah sebagai contoh Negara yang paling fenomenal di dunia. Tak bisa dipungkiri bahwa AS adalah Negara Adi Kuasa yang selalu bisa mengerahkan tangan-tangannya untuk melancarkan kepentingannya di dunia. Untuk itulah, AS selalu berusaha untuk mempertahankan existensinya di tengah-tengah Negara yang menjadi pesaingnya. Ini akan menjadi ancaman yang besar apabila Negara pesaingnya membentuk kerjasama dengan Negara pesaingnya yang lain untuk membentuk kekuatan baru atau terjadinya pengembangan kekuatan di dalam sector militer di antara Negara-negara tersebut. AS selalu berusaha membendung kekuatan yang bisa menjadi ancaman potensial baginya, seperti halnya dengan dilakukannya kerjasama militer dengan Jepang untuk membendung kekuatan yang berada di kawasan tersebut. Kemudian didirikannya pangkalan militer di Jepang tepatnya di Okinawa yang dinilai sangat strategis untuk mengawasi aktivitas Negara yang berpotensi dapat mengancam kelangsungan hidup bahkan keamanan AS sendiri.

Pangkalan Militer AS didirikan di Okinawa karena dilihat dari segi geografis, Okinawa dekat dengan China dan Korea Utara. Seperti yang kita

³⁰ Robert Jacson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relation*, terjemahan Dadan Surya Dipura; New York. Oxford University Press Inc, 1999, hal 88

ketahui saat ini China yang mulai meningkat powernya dan Korea Utara yang melanjutkan program nuklirnya. China yang meningkat perekonomiannya tak heran jika China juga ikut meningkatkan anggaran militernya tiap tahun. Bisa kita lihat saat ini, sekitar 2,3 juta personil militer China dilengkapi dengan fasilitas berteknologi tinggi, peluncuran roket Long March, dan juga berhasil menciptakan program luar angkasa (roket) yang lain.

Hal yang serupa juga dilakukan oleh rival AS, yaitu Korea Utara. Korea Utara hingga saat ini menjadi rival AS yang utama karena program nuklirnya. Negara ini pun masih melanjutkan program nuklirnya hingga saat ini, bahkan diperkirakan ada 100 rudal Korea Utara yang telah mengarah ke AS. Korea Utara menganggap bahwa hanya dengan cara inilah Korea Utara dapat melemahkan AS.

Ini mengakibatkan ancaman potensial AS di wilayah tersebut semakin mencemaskan, sehingga dengan adanya pangkalan ini, AS sebenarnya berada di kawasan yang sangat strategis dalam pertahanan udara. AS benar-benar merasa keamanannya berada dalam keadaan insecure. Oleh sebab itulah AS mempertahankan pangkalan militernya di Okinawa dan berencana meningkatkan kekuatan militernya dengan membangun pangkalan militer modern di Nago untuk mengantisipasi kekuatan China dan Korea Utara.

Sebuah Dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika (National Security Strategy – NSS) yang diterbitkan bulan September 2002 menyebutkan adanya tiga prinsip penting doktrin politik Luar Negeri pada pemerintahan Bush, yaitu: Pertama, mempertahankan kepemimpinan AS di dunia. Kedua, melakukan pre-emptive attack terhadap ancaman potensial bagi AS. Ketiga, mempromosikan prinsip demokrasi liberal.³¹ Menggunakan doktrin-doktri inilah, AS mengerahkan tangan-tangannya untuk menjangkau apa yang sudah terbentuk di benaknya. Jelas bahwa apa yang dilakukan AS di Okinawa adalah langkah dalam menjalankan strategi Keamanan Nasional AS tersebut sebagai pre-emptive attack. Jika Ketahanan Nasional AS terpenuhi melalui langkah pendirian pangkalan militer di Okinawa, maka Keamanan Nasional dan existensi AS diharapkan juga ikut terjamin. Untuk itu lah, AS tetap mempertahankan pangkalan militer tersebut yang dinilainya sangat strategis bagi pertahanan udaranya, untuk mengantisipasi dan mengawasi Negara pesaingnya di kawasan tersebut yang bisa menggempur pertahanan AS di Okinawa kapan saja.

F. Hipotesa :

Berdasarkan Latar Belakang dan Kerangka Pemikiran di atas, maka diperoleh jawaban sementara atas permasalahan mengapa AS tetap mempertahankan keberadaan Pangkalan Militernya di Okinawa di tengah-tengah maraknya tuntutan

³¹ Artikel ditulis oleh Wandy di Wordpress di akses 10 November 2009 di <http://wandyv.wordpress.com/2007/04/20/politik-luar-ncgeri-amerika-di-indonesia/>

supaya pangkalan itu ditutup bahkan pergi keluar Jepang adalah untuk antisipasi ancaman potensial dan proteksi ekonomi AS di wilayah Asia Timur

G. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara garis besar adalah untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepentingan AS untuk mempertahankan keberadaan pangkalan militernya di Okinawa, Jepang sementara rakyat Jepang menuntut supaya pangkalan tersebut ditutup bahkan keluar dari Okinawa.

H. Batasan Penelitian

Dari sejumlah fakta yang telah dijelaskan di atas, penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai kepentingan AS di Okinawa tersebut, hanya saja penulis membuat batasan-batasan, sebagai berikut :

- Objek penelitian adalah negara Amerika Serikat, terutama mengenai Politik Luar Negerinya terhadap Jepang, dan objek penelitian juga mencakup Jepang sendiri khususnya Okinawa, serta sedikit mengenai China dan Korea Utara.
- Kemudian mengenai kepentingan apa yang akan di capai atau dipertahankan oleh AS dengan melihat dari Okinawa sebagai salah satu pulau di Jepang itu sendiri.

I. Teknik Pengumpulan Data

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian kualitatif sekunder, dimana penulis lebih menekankan substantive yang diinterpretasikan menggunakan rujukan, acuan atau referensi-referensi tertentu untuk mengungkap rahasia tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengurangi nilai keilmuannya.

J. Jangkauan Penelitian

Penulis akan menekankan peristiwa-peristiwa social, terutama mengenai maraknya masalah social yang terjadi di Okinawa, yaitu sejak terjadinya peristiwa-peristiwa yang merugikan Okinawa sekitar tahun 1995 hingga sekarang ini dan membuat warga Okinawa marah, dan penulis juga menjangkau penelitian yang sesuai dengan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, yaitu mengenai negara AS, sedikit mengenai China dan Korea Utara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis akan meneliti kejadian atau fakta masa lalu selama itu masih bisa mendukung penelitian ini.

K. Sistematika Penulisan

Setelah melalui beberapa penjelasan di atas, penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada Bab 1 Pendahuluan akan dibahas Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Batasan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Selanjutnya pada Bab II membahas Pangkalan Militer AS di Okinawa. Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum pangkalan militer tersebut beserta pelanggaran dan tuntutan-tuntutan yang muncul di Okinawa selama berdirinya pangkalan militer tersebut hingga sekarang, khususnya yang terjadi akhir-akhir ini.

Kemudian pada Bab III akan membahas lebih lanjut mengenai Dinamika Hubungan AS dan Jepang. Dalam bab ini akan dibahas politik luar negeri AS terhadap Jepang sebagai langkah proteksi dan antisipasi kekuatan besar di wilayah dekat Okinawa, Jepang sejak ditandatanganinya perjanjian keamanan kedua negara tersebut.

Pada Bab IV akan membahas mengenai Antisipasi dan Proteksi Terhadap Ancaman Potensial AS. Dalam bab ini akan dibahas mengenai anggaran pertahanan dan seberapa kuat pertahanan China dan Korea Utara sehingga menjadi ancaman bagi AS yang beranggapan akan menyebabkan instabilitas keamanan.

Selanjutnya pada Bab V akan dibahas Kesimpulan yang memuat intisari dari apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.